**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA**

(Studi Kasus: Desa yang ada di Kecamatan Ngaglik,

Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)

**NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI**

****

Oleh:

*Annisa Zahra*

*16061100*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS MERCUBUANA YOGYAKARTA**

**2019**

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA**

**(Studi Kasus: Desa yang ada di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)**

**THE EFFECT OF VILLAGE GOVERNMENT ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY ON VILLAGE FUND MANAGEMENT**

**(Case Study: Villages in Ngaglik District, Sleman Regency,**

**Special Region of Yogyakarta)**

**Annisa Zahra**

Program Studi Akuntansi Universitas Mercu Buana Yogyakarta

annisazahra971@yahoo.com

# Abstrak

 Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa sangatlah penting, dalam hal ini menuntut pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah akuntabilitas dan transparansi ini berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilakukan di Desa yang ada di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Populasi dalam penelitian ini yaitu 6 desa di Kecamatan Ngaglik dengan jumlah responden 30 orang yang terdiri dari perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Data yang digunakan adalah data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Pengujian yang digunakan yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara parsial signifikan memengaruhi pengelolaan dana desa.

Kata Kunci : Pengelolaan Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi.

*Abstract*

*Accountability and transparency in managing village funds is very important, in this case demanding village government to manage village finances in a professional, effective and efficient, and accountable manner. The purpose of this study was to determine whether accountability and transparency affect the management of village funds. This research was conducted in a village in Ngaglik District, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta. The population in this study were 6 villages in Ngaglik District with 30 respondents consisting of village officials involved in village fund management. The data used are primary data with data collection techniques using a questionnaire. The test used is the validity test, reliability test, classic assumption test, multiple regression analysis and hypothesis testing. Based on the results of research conducted on all data obtained it can be concluded that accountability and transparency partially significantly affect the management of village funds.*

*Keywords: Village Fund Management, Accountability, Transparency.*

 *Audit Committee Size, Number of Audit Committee Meetings.*

1. **Pendahuluan**

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perhatian terhadap desa di Indonesia meningkat dalam akhir tahun ini. Hal ini terjadi karena adanya penetapan peraturan UU Tentang Desa. Hal ini memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola secara mandiri dana desa dan mengembangkan potensinya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari akuntabilitas.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sangat penting karena merupakan salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai entitas yang mengelola dana desa. Jokowi mengatakan Dana desa tahun 2019 akan meningkat sebesar Rp. 73 triliun, "Dana Desa kalau kita lihat Rp 20 triliun di tahun pertama, tahun 2016 Rp 47 triliun. Di tahun 2017 Rp 60 triliun. Tahun ini Rp 60 triliun. Tahun depan kurang-lebih Rp 73 triliun. Semakin besar dananya, tapi penggunaannya harus tepat sasaran. Ini bukan masalah menghabiskan uang. Tapi tepat sasaran dan tepat guna dan bermanfaat. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Namun, kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat karena terdapat beberapa kasus yang terjadi akhir-akhir ini terkait korupsi dana desa.

|  |  |
| --- | --- |
| Tahun | Jumlah Desa |
| 2015 | 22 |
| 2016 | 48 |
| 2017 | 96 |
| 2018 | 98 |

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Korupsi Dana Desa

Sumber: *Indonesia Corruption Watch* (ICW)

Oleh karena itu, peran dari pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Pemerintah desa diwajibkan untuk melakukan pelaporan dana desa yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

# Penelitian ini akan menganalisis implementasi pengelolaan Dana Desa dalam hal Akuntabilitas dan Transparansi. Analisis difokuskan pada pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan mengambil objek penelitian di Desa yang ada di Kecamatan Ngaglik, Daerah Istimewa Yogyakarta.

# Kajian Teori dan Pengembangan Hipotesis

# Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014

#  Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus dan mengurus bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan kemasyarakatan desa. Hal itu berarti seluruh sumber pendapatan desa termasuk dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan desa. Namun mengingat dana desa bersumber dari APBN, maka untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung pembangunan desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

**Tata Kekola Keuangan Desa**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, “Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”.

**Akuntabilitas**

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan menunjukkan catatan atau laporan yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertangungjawaban untuk melaporkan dan menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pihak yang lebih atas (Ngongare, 2017).

**Transparansi**

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Deti Kumalasari, Ikhsan Budi Riharjo, 2015). Transparansi secara harfiah adalah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh. Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan (Arifin, 2015). Transparansi dilakukan oleh pemerintah yang melaksanakan kebijakan kepada masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Teori pemerintah menjelaskan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

**Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Akuntabilitas merupakan suatu upaya untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai segala aktivitas dan kinerja yang telah dilakukan oleh suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabiltas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan. melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahmudi, 2015). Hal ini menegaskan bahwa dengan dilaksanakannya akuntabilitas dalam mengelola dana desa oleh aparatur desa, maka penulis mengajukan hipotesis bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

H1 : Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa. **Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan, sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran berkonsep Value For Money, yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa berkonsep Value For Money.

H2 : Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa.

# Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Misalnya adalah jumlah pembeli saat hari raya idul adha, tinggi badan siswa kelas 3 IPS 2, nilai matematika (…,6,7,8,9,10,…) dan lain-lain (Nuryadi, N dkk, 2017). Data yang diperoleh dihasilkan dari kuesioner yang setelah itu akan diolah menjadi data.

**Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah Desa yang ada di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Seluruh populasi akan diteliti dengan pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu (purvosive sampling). Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan objek pengamatan langsung dan dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan. Dengan kata lain, populasi adalah himpunan keseluruhan objek yang diteliti, sedangkan sampel adalah bagian yang di ambil dari populasi (Nuryadi, N dkk, 2017). Sampel dalam penelitian ini adalah dengan kriteria yang digunakan untuk memilih kriteria responden adalah para aparatur dan pejabat tim pengelola Dana Desa dan atau yang ditunjuk kepala desa yang melaksanakan fungsi dalam pengelolaan Dana Desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan dan Staff keuangan.

**Variabel Penelitian**

Variabel penelitian ini meliputi variabel independen dan dependen:

Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahanya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2017). Yang dijadikan variabel independen dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas dan transparansi.

Variablel Dependen

Variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pengelolaan dana desa.

**Instrumen Penelitian**

 Instrumen penelitian adalah alat pengumpul data yang berupa pedoman observasi, diuji coba terlebih dahulu untuk mengamati perilaku subyek yang komparabel dan prosedur yang terstandar sebelum digunakan untuk mengumpulkan data penelitian yang sesungguhnya (Tukiran dan Hidayati, 2012).

 Skala yang digunakan terdiri dari 5 rincian yaitu :

1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (TS)
3. Netral (N)
4. Setuju (S)
5. Sangat Setuju (SS)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Variabel | Definisi | Indikator | No Soal |
| Akuntabilitas (X1) | Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Ngongare,2017) | 1. Akuntabilitas Manajerial
2. Akuntabilitas Program
3. Akuntabilitas Kebijakan
4. Akuntabilitas Finansial
 | 1-5 |
| Transparansi (X2) | Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. (Moh Mahsun, 2015) | 1. Informatif
2. Keterbukaan
3. Pengungkapan
 | 1-5 |
| Pengelolaan Dana Desa (Y) | Pengelolaan adalah seluruhrangkaian kegiatan yang dimulaidari tahap perencanaan,pelaksanaan. penatausahaan,pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. (PP No 113 tahun 2014) | 1. Transparan2. Akuntabel3. Partisipatif | 1-5 |

Tabel 3.1 Tabulasi Definisi Operasional Variabel

**Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode analissis regresi berganda dengan variabel dependen yaitu pengelolaan dana desa dan variabel independen yaitu akuntabilitas dan transparansi. Data diolah menggunakan *software* SPSS. Persamaan regresi pada penelitian ini sebagai berikut:

Y = α+ β1X1 + β2X2 + e

Keterangan:

X1 = Akuntabilitas

X2 = Transparansi

Y = Pengelolaan Dana Desa

α = Nilai Konstanta

β1 , β2 = Koefisien regresi

e = Erorr/Residual

**Pengujian Hipotesis**

Uji Hipotesis Secara Parsial/individu (Uji t)

 Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat (Savitri, 2010). Penelitian ini menggunakan α = 5 %, jadi jika nilai signifikansi < 0,05 maka berarti variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai signifikansi > 0,05 maka berarti variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Uji Hipotesis Pengujian hipotesis secara bersama (uji F)

 Pengujian Hipotesis secara bersama merupakan pengujian hipotesis koefisien Regresi berganda dengan X1 dan X2 secara bersama-sama mempengaruhi Y.

# Hasil dan Pembahasan

**Deskripsi Sampel**

Penelitian ini mengambil populasi seluruh desa yang ada di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa-desa tersebut adalah :

|  |  |
| --- | --- |
| No | Nama Desa |
| 1. | Sardonoharjo |
| 2. | Sinduharjo |
| 3. | Sariharjo |
| 4. | Donoharjo |
| 5. | Minomartani |
| 6. | Sukoharjo |

Tabel 4.1 Desa yang ada di Kecamatan Ngaglik

Seluruh populasi akan diteliti dengan pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan untuk memilih responden adalah para aparatur dan pejabat tim pengelola Dana Desa atau yang ditunjuk oleh kepada desa untuk melaksanakan fungsi dalam pengelolaan dana desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan dan Kaur program.

**Ringkasan Penyebaran Kuesioner**

|  |  |
| --- | --- |
| **Keterangan** | **Jumlah** |
| Kuesioner yang disebar | 30 |
| Kuesioner yang dikembalikan | 30 |
| Tingkat Pengembalian | 100% |

Tabel 4.2 Ringkasan Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

Berdasarkan tabel 4.2 bahwa kuesioner yang disebar sebanyak 30 kuesioner. Kuesioner yang kembali sejumlah 30 kuesioner dengan tingkat pengembalian 100%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jenis Kelamin** | **Frekuensi** | **Presentase (%)** |
| Laki-laki | 19 | 63,3 |
| Perempuan | 11 | 36,7 |
| Total | 30 | 100 |

Tabel 4.3 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 19 orang responden (63,3%), sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 11 orang responden (36,7%).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tingkat Pendidikan** | **Frekuensi** | **Presentase (%)** |
| S1 | 20 | 66,7 |
| D3 | 4 | 13,3 |
| SMA | 6 | 20 |
| Total | 30 | 100 |

Tabel 4.4 Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 20 orang (66,7%). Diploma (D3) sebanyak 4 orang (13,3%) dan SMA sebanyak 6 orang (20%).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Masa Kerja** | **Frekuensi** | **Presentase (%)** |
| 1-5 tahun | 17 | 56,7 |
| 5-10 tahun | 9 | 30 |
| >10 tahun | 4 | 13,3 |
| Total | 30 | 100 |

Tabel 4.5 Karakteristik Responden berdasarkan Masa Kerja Jabatan

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa responden yang memiliki masa kerja 1-5 tahun sebanyak 17 orang (56,7%), masa kerja 5-10 tahun sebanyak 9 orang (30%) dan masa kerja >10 tahun yaitu 4 orang (13,3%).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator** | ***Pearson Correlation* (r hitung)** | **r tabel** | **Keterangan** |
| X1.1 | 0,768 | 0,361 | Valid |
| X1.2 | 0,566 | 0,361 | Valid |
| X1.3 | 0,407 | 0,361 | Valid |
| X1.4 | 0,707 | 0,361 | Valid |
| X1.5 | 0,566 | 0,361 | Valid |

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas

 Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji validitas variabel akuntabilitas di atas semua item pernyataan menunjukan nilai r hitung > r tabel= 0,361 yang artinya semua indikator X1.1, X1.2, X1.3, X1.4 dan X1.5 yaitu valid.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator** | ***Pearson Correlation* (r hitung)** | **r tabel** | **Keterangan** |
| X2.1 | 0,521 | 0,361 | Valid |
| X2.2 | 0,396 | 0,361 | Valid |
| X2.3 | 0,538 | 0,361 | Valid |
| X2.4 | 0,582 | 0,361 | Valid |
| X2.5 | 0,420 | 0,361 | Valid |

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi

 Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji validitas variabel transparansi di atas semua item pernyataan menunjukan nilai r hitung > r tabel= 0,361 yang artinya semua indikator X2.1, X2.2, X2.3, X2.4 dan X2.5 yaitu valid.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator** | ***Pearson Correlation* (r hitung)** | **r tabel** | **Keterangan** |
| Y.1 | 0,706 | 0,361 | Valid |
| Y.2 | 0,719 | 0,361 | Valid |
| Y.3 | 0,592 | 0,361 | Valid |
| Y.4 | 0,610 | 0,361 | Valid |
| Y.5 | 0,628 | 0,361 | Valid |

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Pengelolaan Dana Desa

 Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji validitas variabel pengelolaan dana desa di atas semua item pernyataan menunjukan nilai r hitung > r tabel= 0,361 yang artinya semua indikator Y.1, Y.2, Y.3, Y.4 dan Y.5 yaitu valid.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Jumlah item** | ***Cronbach’s Alpha*** | **Alpha** | **Keterangan** |
| Akuntabilitas | 5 | 0,893 |  > 0,60 | Valid |
| Transparansi | 5 | 0,646 | > 0,60 | Valid |
| Pengelolaan Dana Desa | 5 | 0,664 | > 0,60 | Valid |

Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas

Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji reliabilitas diperoleh nilai koefisien Cronbach Alpha untuk variabel akuntabilitas, transparansi dan pengelolaan dana desa lebih besar dari 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel dan dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data.



Tabel 4.10 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh informasi bahwa nilai minimum variabel akuntabilitas adalah 18, nilai maksimum adalah 25, nilai rata-rata sebesar 23,45 dan standar deviasi 2,208. Pada variabel Transparansi nilai minimum adalah 19, nilai maksimum adalah 25, nilai rata-rata sebesar 22,73 dan standar deviasi 2,016. Pada variabel Pengelolaan Dana Desa nilai minimum adalah 19, nilai maksimum adalah 25, nilai rata-rata sebesar 22,27 dan standar deviasi 2,033.

* 1. **Pengujian Hipotesis**
1. Uji Individu (uji t)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan secara parsial. Pengujian ini dilakukan dengan taraf signifikan (sig), jika taraf signifikan dihasilkan dari perhitungan dibawah 0,05 maka hipotesis diterima, sebaliknya jika taraf signifikan hasilnya lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak.

Hasil Uji t disajikan pada tabel 4.14 berikut ini :

|  |
| --- |
| **Coefficientsa** |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics |
| B | Std. Error | Beta | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 6,034 | 3,951 |  | 1,527 | ,138 |  |  |
| Akuntabilitas | ,301 | ,146 | ,340 | 2,058 | ,049 | ,834 | 1,199 |
| Transparansi | ,404 | ,167 | ,400 | 2,424 | ,022 | ,834 | 1,199 |
| a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa |

Tabel 4.14 Hasil Uji t

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat signifikansi pada variabel akuntabilitas 0,04 < 0,05 artinya dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan pada pada variabel transparansi 0,02 < 0,05 jadi dapat disimpulkan bahwa H2 diterima.

1. **Akuntabilitas (X1) berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y)**

Hasil uji hipotesis individual untuk variabel Akuntabilitas (X1) menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pengelolaan dana desa (Y). Hal ini digambarkan dengan diterima nya H1 karena nilai signifikasi X sebesar 0,049 karena nilai sig < dari 0,05= 0,049 < 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Y). Hasil ini diperjelas penyataan dan alasan kuesioner pengelolaan dana desa bahwa akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan. melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah. Maka pemerintah dituntut untuk dapat meningkatkan akuntabilitas dalam upaya mendorong pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.

1. **Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Hasil uji hipotesis individual untuk variabel Transparansi (X2) menunjukan bahwa variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pengelolaan dana desa (Y). Hal ini digambarkan dengan diterima nya H2 karena nilai signifikasi X sebesar 0,022 karena nilai sig < dari 0,05= 0,022 < 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa Transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Y). Transparansi adalah pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti (Mahmudi, 2015). Salah unsur utama dalam pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan adanya transparansi, Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak dan SKPD diharapkan memiliki kinerja yang baik yaitu dengan memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.

1. Uji F

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen secara signifikan secara parsial. Pengujian ini dilakukan dengan taraf signifikan (sig), jika taraf signifikan dihasilkan dari perhitungan dibawah 0,05 maka hipotesis diterima, sebaliknya jika taraf signifikan hasilnya lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak.

Hasil Uji F disajikan pada tabel 4.15 berikut ini :

|  |
| --- |
| **ANOVAa** |
| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 46,331 | 2 | 23,166 | 8,506 | ,001b |
| Residual | 73,536 | 27 | 2,724 |  |  |
| Total | 119,867 | 29 |  |  |  |
| a. Dependent Variable: Y |
| b. Predictors: (Constant), X2, X1 |

Tabel 4.15 Hasil Uji F

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat signifikansi 0,001 artinya dapat disimpulkan bahwa sangat signifikan karena 0,001 < 0,05.

* 1. **Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan jika jumlah variabelnya minimal dua. Setelah melakukan regresi Dengan SPSS versi 21 maka hasil yang didapat adalah sebagai berikut:

|  |
| --- |
| **Coefficientsa** |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics |
| B | Std. Error | Beta | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | 6,034 | 3,951 |  | 1,527 | ,138 |  |  |
| Akuntabilitas | ,301 | ,146 | ,340 | 2,058 | ,049 | ,834 | 1,199 |
| Transparansi | ,404 | ,167 | ,400 | 2,424 | ,022 | ,834 | 1,199 |
| a. Dependent Variable: Pengelolaan Dana Desa |

Tabel 4.15 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil regresi berganda yang peneliti lakukan dalam variabel Akuntabilitas X1 dan Transparansi X2 berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Y) diketahui nilainya dapat digambarkan persamaan regresi berganda sebagai berikut:

Y = α+ β1X1 + β2X2 + e

Nilai Y = 6,043 + 0,301X1 + 0,404X2 + e

Nilai koefisien regresi Akuntabilitas X1 terhadap pengelolaan dana desa adalah sebesar 0,301 (30,1%) berarti Akuntabilitas X1 mempunyai hubungan terhadap pengelolaan dana desa Y sebesar 30,1%, artinya jika ada peningkatan akuntabilitas X1 sebesar 100% maka akan meningkatkan pengelolaan dana desa sebesar 30,1%, begitu juga sebaliknya jika penurunan akuntabilitas X1 sebesar 100% maka akan menurunkan pengelolaan dana desa Y sebesar 30,1%. Jadi akuntabilitas berhubungan positif terhadap pengelolaan dana desa. Hasil ini diperjelas tentang pentingnya akuntabilitas dalam pemerintahan desa, semakin baik akuntabilitas suatu organisasi maka akan semakin baik pengelolaan keuangannya. Hasil ini juga dilihat dari jawaban responden terhadap kuesioner yang diberikan, dimana jawaban responden yang menunjukan setuju tentang berbagai prosedur hukum yang harus di patuhi hingga menyajikan laporan realisasi dana desa sebagai bukti pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat.

Nilai koefisien regresi transparansi X2 terhadap pengelolaan dana desa adalah sebesar 0,404 (40,4%) berarti transparansi X2 mempunyai hubungan terhadap pengelolaan dana desa Y sebesar 40,4%, artinya jika ada peningkatan transparansi X2 sebesar 40,4% maka akan meningkatkan pengelolaan dana desa sebesar 40,4%, begitu juga sebaliknya jika penurunan transparansi X2 sebesar 100% maka akan menurunkan pengelolaan dana desa Y sebesar 40,4%. Jadi transparansi berhubungan terhadap pengelolaan dana desa. Hasil ini di sampaikan juga oleh Sekretaris Desa Sardonoharjo bahwa keterbukaan pemerintah desa tentang keuangan desa itu penting untuk memberikan kejelasan penggunaan anggaran. Hubungan positif ini juga diperjelas dari hasil kuesioner yang diberikan kepada responden yang ada pada setiap desa di Kecamatan Ngaglik. Hasil kuesioner tersebut menunjukan bahwa keterbukaan informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat sangat penting dilakukan, hal itu ditunjukan dari item pertanyaan yang diberikan, dan masyarakat mendominasi menjawab setuju agar pemerintah dapat memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat.

# Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilakukan di Desa pada Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan responden perangkat desa. Berdasarkan pada hasil pengujian dan pembahasan yang penulis sajikan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa dan juga Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa serta secara simultan Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Saran

Populasi dalam penelitian ini hanya pada 1 Kecamatan yang teridiri dari 6 Desa, maka penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah populasi dan juga sampel yang digunakan penelitian ini hanya 30 responden, maka penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel. Penelitian selanjutnya diharapkan kuesioner penelitian lebih menyesuaikan kondisi nyata dan kemampuan perangkat desa, serta memastikan jawaban dari responden agar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

**Daftar Pustaka**

Ferina, Ika Sasti, Burhanuddin, dan Herman Lubis. 2016*. Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Hilir).* Jurnal Manajemen danBisnis Sriwijaya Vol.4 No. 3

Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2005.

Mahmudi. 2015*. Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*.Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahsun, Moh, Sulistyowati, Firma, dan Heribertus Andre Purwanugraha. 2015*. Akuntansi Sektor Publik*. BPFE. Yogyakarta.

Ngongare, Yanis. 2016. “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam

Pembangunan Infrastrukturdi Desa Kokoleh Satu Kecamatan Likupang Selatan.” Jurnal Eksekutif 1(8)

Nuryadi, N., Astuti, T. D., Sri Utami, E., & Budiantara, M. (2017). Dasar-Dasar Statstk Penelitan.

Rasul, Syahruddin. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran.* Jakarta: Detail Rekod.

Sugiyono. 2017 . Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.

Suharto, Edi. 2006. *Membangaun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama. Bandung

Tukiran dan Hidayati. 2012. Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.

Wardana, Ibnu. 2016. “*Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa*”. Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Semarang.

**Perundang-undangan :**

Undang-Undang No 6 tahun 2014

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 Pasal 29

Permendagri 113 Tahun 2014